

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Sumber Lainnya

Barata, A. A. (2003). *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Barlianto, A. D., & Indri Riesfandiari, I. (2021). Evaluasi Manfaat Kawasan Berikat Mandiri dalam Meningkatkan Kinerja Logistik dan Kinerja Operasional Pengusaha Kawasan Berikat (Pkb) X Di Purwakarta. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*.

Kanedi, I., Utami, F. H., & Zulita, L. N. (2017). *Sistem Pelayanan Untuk Peningkatan Kepuasan Pengunjung pada Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Bengkulu*. Pseudocode.

Purba, B. J., & Arfin. (2021). Analisis Peranan Liaison Officer dalam Pelayanan dan Pengawasan Secara Mandiri pada Kawasan Berikat Mandiri. *Jurnal Ilmiah Publika*.

Purwadi. (2017). Pengaruh Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda. *Akuntabel*, 188.

Taufana, V. A. (2014). *Kualitas Pelayanan dalam Perspektif Strategi Pelanggan di Bandara Sepinggan, Balikpapan*. Pelayanan Publik.

Valentina, D. (2019). Analisis Pengawasan serta Pengaruh Kawasan Berikat Terhadap Arus Kas, Beban Pajak dan Aktivitas Ekspor PT.XYZ. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan*, 69.

2. Dokumen Publik atau Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2018 tentang Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerimaan Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat.

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-09/BC/2014 tentang Penerapan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer pada Perusahaan Pengguna Fasilitas Pembebasan, pengembalian, dan Tempat Penimbunan Berikat, serta Kerahasiaan Data dan/atau Informasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 291/KMK.05/1997
tentang *Kawasan Berikat*.